

**Koordinasi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pematang Kerasaan
Rejo**

SKRIPSI

OLEH

**RETNO AYU TIA
NPM 1703100054**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **RETNO AYU TIA**
NPM : 1703100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa pematang kerasaan rejo

Medan, Oktober 2021

PEMBIMBING



AFFAN AL-QUDDUS., S.Sos., M.Si.

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA S. Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RETNO AYU TIA**

NPM : 1703100054

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Jum'at, 15 OKTOBER 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos.,MSP.** 

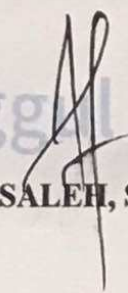
PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.** 

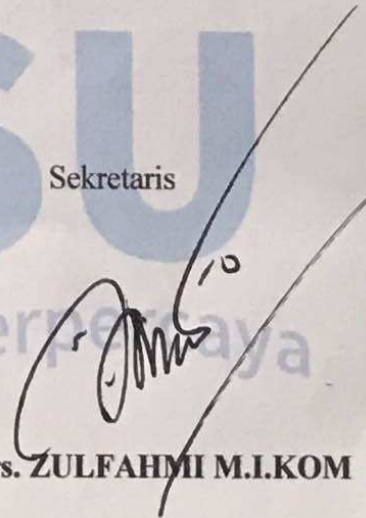
PENGUJI III : **AFFAN AL-QUDDUS., S.Sos., M.Si.** 

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP


Drs. ZULFAHMI M.I.KOM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Dengan ini saya, Retno Ayu Tia NPM 1703100054 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan , 15 oktober 2021

Yang menyatakan



Retno Ayu Tia

ABSTRAK

**KOORDINASI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG
KERASAAN REJO**

RETNO AYU TIA

1703100054

Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan banyak hal dan sumber pendanaannya telah diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan kepada tugas dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa Pematang Kerasaan Rejo dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, melalui wawancara terbuka dengan pihak Kantor Desa sebanyak 4 (Empat) orang. Adapun Kategorisasi dalam penelitian ini a) Adanya sumber daya manusia yang memadai b) Adanya manajemen pekerjaan c) Adanya penyediaan jumlah dana dan waktu dalam mencapai tujuan d) Adanya penempatan lokasi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala-kendala mengingat adanya perkumpulan warga yang memiliki pendapat dan pemikiran atas hidup mereka sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ini kurang maksimal sehingga ada beberapa proses-proses pelaksanaan kerja yang belum optimal.

Kata Kunci : Koordinasi, Kepemimpinan, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis kepada Allah SWT, atas nikmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat berpikir dan merasakan segalanya, sehingga penulis menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**KOORDINASI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN REJO**”. Shalawat beriring salam kita persembahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dan disinari cahaya Iman dan Islam. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Rahmat dan Ibunda Sumini, yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr.Agussani., MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr.Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.ikom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani S.Sos M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jehan Ridho Izarsyah, S.sos. M.Si selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Affan Alquddus, S.sos sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berjasa memberikan ilmu.
10. Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sudah banyak membantu penulis
11. Kepala Desa Pematang Kerasaan Rejo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas tersebut.
12. Bapak Sidiq Purnomo yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian

13. Bapak Sabaruddin yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
14. Bapak Mahendra yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
15. Bapak Usman Saragih yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
16. Teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan juga saran kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya *Amin yaRabbal'alam*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 07 Oktober 2021

Penulis

RETNO AYU TIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1`
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Koordinasi	6
2.2 Kepemimpinan	14
2.3 Kepala Desa	18
2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Kerangka Konsep	29
3.3 Definisi Konsep.....	30
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	31
3.5 Informan atau Narasumber.....	32

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	33
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
3.9.1 Gambaran Umum Desa Pematang Kerasaan Rejo.....	34
3.9.2 Lokasi dan Keadaan Wilayah.....	35
3.9.3 Struktur dan Deskripsi Tugas Perangkat Desa.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Deskripsi Narasumber	43
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara	48
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Sumber Daya Manusia yang Memadai Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat.....	50
4.2.2 Manajemen Pekerjaan Dalam pemberdayaan Masyarakat	51
4.2.3 Penyediaan Jumlah Dana Dan Waktu Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	52
4.2.4 Penempatan Lokasi Sebagai Tempat Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat	53
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	29
Gambar 3.2 Letak dan Keadaan Wilayah	35
Gambar 3.3 Sturktur dan Deskripsi Tugas Perangkat Desa.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Pematang Kerasaan Rejo	37
Tabel 4.1 Keadaan Narasumber Berdasarkan Usia, Jabatan, dan Lama Bekerja	43
Tabel 4.2 persentase narasumber berdasarkan jenis kelamin	44
Tabel 4.3 persentase narasumber berdasarkan usia	44
Tabel 4.4 persentase narasumber berdasarkan lama bekerja	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
- Lampiran VIII : Surat mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan telah selesai meelakukan penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat agar terjalannya hidup dan juga keadaan sosial, ekonomi, kebudayaan dan juga peningkatan hidup warganya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal - usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Kepala Desa selaku pemimpin adalah mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparat pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena keberhasilan suatu organisasi baik itu organisasi besar maupun kecil tergantung orang-orang yang terlibat di dalamnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 26 ayat 1, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh kerjasama yang baik antar individu di dalam organisasi atau instansi yang menjadi wadah kegiatan tersebut, mengingat masyarakat pedesaan masih banyak yang berpikiran bahwa pendidikan tinggi tidaklah penting sehingga kurangnya pengetahuan dan dominan lebih tertinggal oleh jaman dan akan sulit untuk mengejar ketertinggalan tersebut apabila hubungan antara pimpinan atau kepala desa dengan partisipasi masyarakat yang rendah seperti yang terjadi di Desa pematang Kerasaan Rejo.

Oleh sebab itu koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja yang harus dilakukan secara terpadu. Dalam kegiatan koordinasi, Kepala Desa Pematang Kerasaan Rejo membina, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah desa lainnya seperti Camat, LPMN, dan juga Kadus agar tujuan koordinasi dapat tercapai.

Pemberdayaan masyarakat di pedesaan sangat penting terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan juga hanya bisa mengandalkan tenaga saja untuk mendapatkan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan apa yang dilihat di Desa Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar, tingkat pendidikan, pola pikir, kreativitas dan daya saing masyarakat desa Pematang Kerasaan Rejo dalam mengelola ekonominya masih rendah, karna jika di lihat dari program program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa

Pematang Kerasaan Rejo telah terarah namun belum berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan diantaranya adalah rapat desa yang melibatkan masyarakat untuk ikut bergabung membahas kegiatan apa yang akan dilakukan dalam memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dan kreatif, namun sayangnya respon yang didapat sangatlah kecil sehingga menyulitkan para pejabat desa menentukan program pemberdayaan desa seperti apa yang dapat menggerakkan seluruh masyarakat agar maju.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Pematang Rejo selain rapat desa yaitu pengembangan usaha UMKM yang mencakup usaha pembuatan tempe, usaha pembuatan kerupuk putih, usaha kerupuk tempe dan udang, usaha tape dan lainnya yang dapat mendongkrak pembangunan desa tersebut, namun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kreatifitas sehingga produk yang dihasilkan kurang bervariasi dan juga respon masyarakat yang kurang tertarik dengan edukasi misalnya workshop mengenai inovasi produk agar lebih kekinian juga menyulitkan para pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat ini.

Berdasarkan masalah yang ada Maka dari itu, Penulis tertarik untuk meneliti tentang “Koordinasi kepemimpinan kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Koordinasi Tingkat Pimpinan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pematang Kerasaan Rejo Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Koordinasi tingkat pimpinan desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa pematang kerasaan rejo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara subyektif, bermanfaat bagi peneliti untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait.
- c. Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan perbandingan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara sub bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis penelitian metode penelitian yang digunakan dan juga narasumber serta lokasi yang menjadi objek penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian

BAB V : PENUTUP

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Koordinasi

2.1.1 Pengertian Koordinasi

Menurut Ismail Solihin (2009: 91), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Yohanes Yahya (2006:95) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko (2003:195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dana dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut E.F.L Brech (2007:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaannya yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Menurut Manulang (2000:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

1. Perlunya koordinasi dalam pembangunan

Beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik dalam menilai diperlukannya koordinasi pembangunan adalah sebagai berikut :

- a) Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis dari adanya aktifitas dan kepentingan yang berbeda. Aktifitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggungjawab yang secara fungsional berbeda pula.

- b) Terdapat institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
- c) Terdapat unsur sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses pembangunan yang melibatkan institusi pusat ataupun daerah.
- d) Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyesuaian dalam proses pembangunan sehingga akan tercipta suatu aktifitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Djamin (2011: 86) menyatakan koordinasi sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Ada dua tipe koordinasi menurut Hasibuan (2008: 86) yaitu:

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

2. Koordinasi horizontal yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat aparat yang setingkat. Koordinasi ini terbagi atas:

a. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

b. Interrelated adalah koordinasi antara badan instansi, unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, secara intern maupun ekstern levelnya setara, koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat

2.1.2 Prinsip Koordinasi

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok atau apa yang diyakini menjadi kebenaran pada suatu waktu tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip koordinasi adalah kebenaran-kebenaran yang pokok atau apa yang diyakini menjadi kebenaran-kebenaran dalam bidang koordinasi.

Menurut R.Terry dan Stephene Franklin (2006) mengatakan bahwa prinsip-prinsip dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan atau kebenaran yang pokok yang memberikan suatu petunjuk untuk berpikir atau bertindak. Pernyataan yang pokok memberitahukan hasil-hasil apakah yang dikemukakan bila prinsip itu diterapkan. Berikut adalah beberapa prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu :

1. George R. Terry, mengatakan bahwa koordinasi itu membantu memperbesar hasil kerja suatu kelompok dengan jalan mendapatkan keseimbangan dan menyatupadukan kegiatan bagian-bagian yang penting, menunjukkan partisipasi kelompok dalam tahap awal perencanaan dan mendapatkan penerimaan tujuan kelompok dari setiap anggota.
2. Menurut Dann Sugandha (2011) mengatakan bahwa beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adalah :
 - a) Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang
 - b) harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
 - c) Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus
 - d) dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan
 - e) jadwalnya.
 - f) Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian
 - g) tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
 - h) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
 - i) Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
 - j) Adanya informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.

- k) Adanya saling hormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Adapun syarat-Syarat Koordinasi Menurut Tripethi dan Reddy, syarat untuk mencapai koordinasi manajemen yang efektif ada sembilan, syarat yaitu :

- a. Hubungan langsung Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.
- b. Kesempatan berbicara atau mengutarakan pendapat, Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- c. Konstitusi Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama perusahaan berfungsi.
- d. Dinamisme Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan- perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik akan mengetuai masalah secara dini dan mencegah kejadiannya.

- e. Tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberitahu tentang tujuan perusahaan dan diminta agar berkerja untuk tujuan bersama perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberikan keselarasan tindakan.

- f. Organisasi yang sederhana Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik diantara bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seorang pimpinan apabila hak ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi agar semua bagian yang saling berhadapan dapat dibicarakan kepada seorang atasan bersama untuk menjamin koordinasi yang lebih baik. Suatu sub bagian merupakan suatu contoh jelas pengelompokan ini. Suatu sub bagian membuat koordinasi lebih mudah dan membantu penyusunan yang cepat terhadap perubahan lingkungan.

- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu manajer

dalam mengawasi bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.

- h. Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan- perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya, dapat dibicarakan. Melalui komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan- pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan perusahaan yang ditentukan.
- i. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada lain yang dapat menggantikannya.

2.2 Kepemimpinan

2.2.1 Konsep Kepemimpinan

Menurut Zaccaro (2001:453) kepemimpinan sebagai suatu keahlian dalam memberikan pengaruh pada individu atau sekelompok orang untuk memperoleh visi atau tujuan, Seperti halnya pada organisasi formal, dampak ini dapat menjadi bersifat formal yang diberikan oleh pimpinan yang memegang sebuah jabatan pada organisasi sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh bawahannya. Seorang pemimpin dalam dilihat dari bagaimana Pemimpin tersebut dapat mempengaruhi orang lain dengan charisma yang dimilikinya dan juga dapat mengendalikan semua situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya di lingkungannya. Seorang pemimpin juga harus memiliki kestabilan emosi dalam memimpin para anggota di bawahnya dan bersikap adil kepada para anggota-anggota.

Menurut John D. Millet (2002) ada dua hal pokok dalam kepemimpinan yaitu: politik dan institusional/ kelembagaan. Yang dimaksud dengan kondisi politik ialah perlunya setiap kali kepemimpinan dalam pemerintahan memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, pengarahan dan mungkin juga kontrol yang datang dari luar pemerintahan (dari rakyat) yang mana pada umumnya berlatar belakang politik.

Yang dimaksud dengan kondisi kelembagaan (institusional) bagi kepemimpinan ialah dimilikinya kemampuan untuk memberikan tanggapan dan perhatian terhadap berbagai macam kebutuhan operasional di dalam organisasi, yaitu kebutuhan guna menjamin berlangsungnya proses kehidupan organisasi

pemerintahan. Dengan demikian diharapkan pada badan pemerintah mampu beroperasi untuk menghasilkan keluaran (out-put) yang diperlukan masyarakat atau pihak lain dalam mencapai tujuan pemerintahan negara.

Selain itu, pemimpin harus memiliki: pertama, instuisi, yaitu keterlibatan pemimpin dalam menatap situasi, mengantisipasi perubahan, mengambil resiko dan membangun kejujuran. Kedua, pandangan, yaitu keterlibatan pemimpin dalam mengimajinasikan suatu kondisi untuk memperbaiki lingkungan organisasi. Ketiga, nilai keselarasan, yaitu kemampuan pemimpin untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam organisasinya, nilai-nilai yang dimiliki bawahannya, serta dapat memadukan kedua nilai tersebut menuju organisasi yang efektif. Keempat, kepastian akan maksud dan arah tujuan.

Menurut McShane dan Von Glinow (2010:360) kepemimpinan ialah memengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi ke arah keberhasilan organisasi sebagai wujud keanggotaan untuk bekerja secara antusias menuju pada pencapaian

Kepemimpinan dipandang sebagai hubungan yang didasarkan atas pengaruh dan kekuasaan. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam teori ini yaitu: (1) Bagaimana seorang pemimpin mempunyai kekuasaan akan menjadi efektif dan faktor-faktor situasi yang sesuai, (2) Sejauh mana gaya kepemimpinan seseorang mempengaruhi perilaku dan kinerja bawahan. Fiedler mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil, tergantung pada penerapan gaya pemimpin terhadap tuntutan situasi.

2.2.2 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan dapat dikatakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan keberhasilan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Menurut Hersey dan Balnchard (1993) gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seseorang yang mencoba mempengaruhi kegiatan orang lain seperti yang dirasakan orang-orang lainnya.

Menurut Rivai dan Mulyadi (2003:42) gaya kepemimpinan adalah pola keseluruhan dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tmauerlihat pun yang tidak terlihat. Gaya kepemimpinan menggambarkan ketrampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu mementingkan pelaksanaan tugas, hubungan kerja sama, dan hasil yang dapat dicapai.

Gaya kepemimpinan yang efektif menurut Salam (2002:95) timbul karena di dorong oleh :

1. Motivasi dan bakat seseorang yang menimbulkan kepemimpinan seperti :
 - a. Penuh inisiatif, energik, dan ambisi.
 - b. Tekanan dan proaktif dalam mengejar sasaran.
 - c. Mempunyai keinginan memimpin tetapi tidak mengharapakan kekuasaan.
 - d. Jujur, memiliki integritas tinggi, dan dapat dipercaya.

- e. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam memikul tanggung jawab.
 - f. Sering kali lebih kreatif.
 - g. Bisa fleksibel.
2. Memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang menimbulkan kepemimpinan, seperti:
- a. Memiliki pengetahuan yang luas baik intern organisasi maupun ekstern organisasi.
 - b. Memiliki keahlian dalam hubungan antara manusia, membangun jaringan komunikasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, menetapkan sasaran.
 - c. Memiliki kemampuan kongnitif terutama kemampuan mengelolah informasi serta memadukan dan menarik kesimpulan yang logis.
3. Memiliki visi yang jelas yang dalam hal :
- a. Menetapkan apa yang harus dikerjakan agar visi dapat terwujud.
 - b. Mengartikulasikan visi tersebut dengan ringkas.
 - c. Memformulasikan visi strategis.
 - d. Mengembangkan komitmen diantara pengikut dengan cara yang jelas.
 - e. Mengimplementasikan visi serta berusaha merealisasikannya.

2.3 Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam struktur pemerintah di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua, didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya kerajaan oleh karena itu mempunyai hak otonom penuh. Pengertian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, kepala desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kepala desa sebagai pimpinan

desa, mengacu pendapat Soemarno dan Dardjosumardjono menyatakan bahwa “Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa”.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa, disamping itu kepala desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya.

2.3.2 Wewenang/kekuasaan Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa.desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 15 tentang Desa, yaitu:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2.3.3 Tipe Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut Mustakim Zaini (2015:11) tipe kepemimpinan Kepala Desa dibagi menjadi tiga tipe, yakni Kepemimpinan regresif, konservatif involutif dan inovatif-progresif.

1. Kepemimpinan regresif, yaitu kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang.
2. Kepemimpinan konservatif involutif, yaitu kepemimpinan yang pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas serta melaksanakan fungsi Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Desa.

3. Kepemimpinan inovatif progresif, yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut.

Menurut Sulistiyani (2004:7) pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Widjaja, (2003:169) pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra yaitu:

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Dinamika yang dibangun adalah kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masingmasing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendalakendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk keberlanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.4.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Usman (2004) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberi kemampuan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan kelatar belakang / kesenjangan / ketidak berdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan. Kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Keterlatarbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena di gunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional.

Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural(kebijakan) dan kultural Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

2.4.4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang.

Pembangunan jalan dari dana desa menuju pemukiman warga yang terisolir. Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor goeografis.

Dalam teori Talcott Parson tentang sistem mengatakan bahwa untuk melakukan suatu tindakan harus ada *adaption* kebutuhan dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital yang meningkatkan keberdayaan masyarakat. Pembangunan jalan berdampak pada aspek social masyarakat tersebut, terbuka jalan warga dirasakan dari aspek social masyarakat yang dulunya warga kampung ini dipandang sebelah

2. Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik

Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa Upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi pengelolaan dana desa. Dalam mengelola dana desa yang jumlahnya besar dibutuhkan bimbingan kepada perangkat desa, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengelola keuangan desa karena sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karena itu pelaksanaan bimtek sangat memberi kontribusi yang baik. Kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh perangkat Desa.

berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan sumber daya aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa. Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru dilantik dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 60) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.

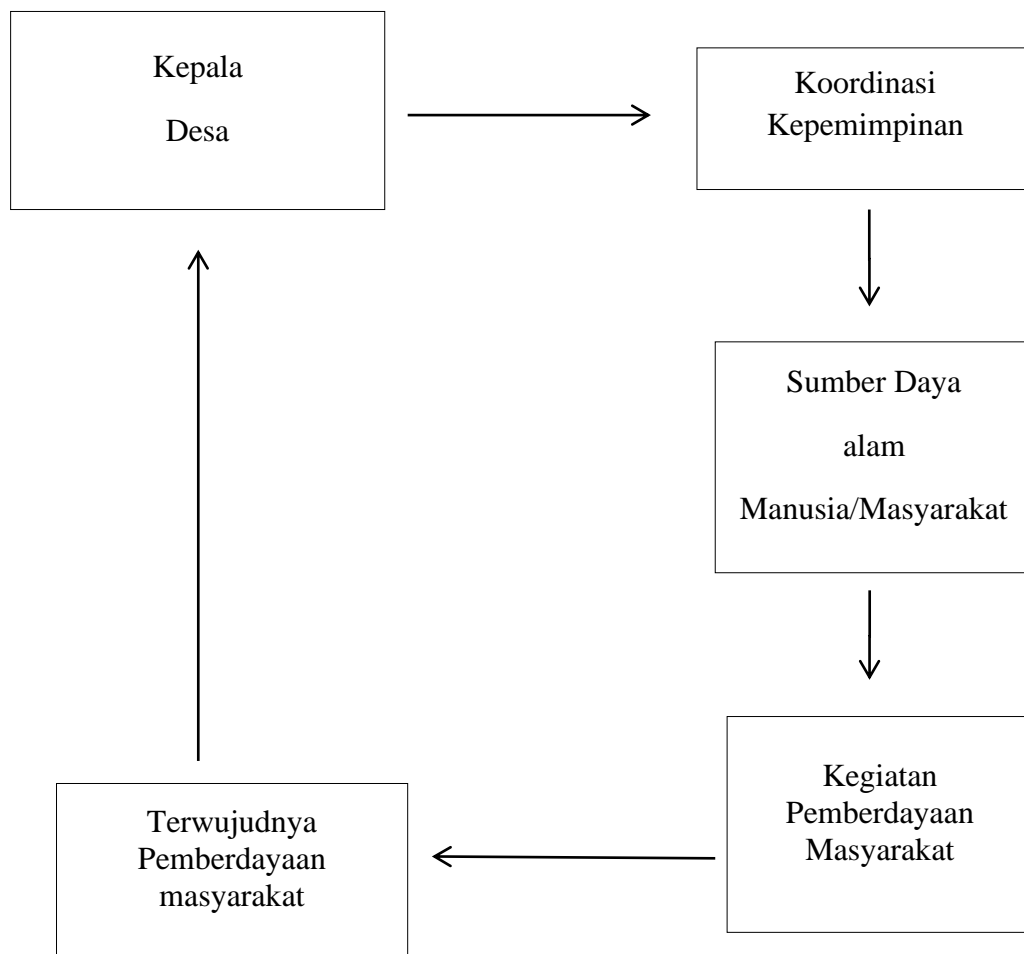
Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo. Maka kerangka konsep digambarkan dalam bentuk model teoritis sebagai berikut :

Gambar 3.1

**kerangka konsep Koordinasi Kepemimpinan Kepala Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo**



(Sumber:peneliti 2021)

3.3 Definisi konsep

Menurut Bagong Suyatna (2005:49) konsep adalah makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepehaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

- a. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Koordinasi Kepemimpinan merupakan keseluruhan usaha, cara, seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.
- c. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu dan kelompok yang hidup dalam suatu daerah/wilayah yang terjalin dengan adat istiadat hukum, tradisi yang mengarah pada kesatuan hidup.

- d. Kegiatan atau Program adalah suatu bentuk usaha, intruksi, maupun urutan langkah-langkah yang diimplementasikan untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah.
- e. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Adanya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- b) Adanya manajemen pekerjaan dalam pemberdayaan masyarakat.
- c) Adanya penyediaan jumlah dan waktu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d) Adanya penempatan lokasi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3.5 Informan atau Narasumber

Informan Kunci (*key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai macam informasi pokok yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Adapun informan kunci tersebut adalah:

1. Pangulu atau Kepala Desa Pematang Pematang Kerasaan Rejo: **Bapak Sidiq Purnomo**
2. Kepala LPMN (lembaga pemberdayaan masyarakat nagari): **Bapak Sabaruddin**
3. Kepala Urusan Pembangunan: **Bapak Mahendra**
4. Kepala Dusun atau Gamot: **Bapak Usman Saragih**

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

- a. Data primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2010:335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena merupakan lokasi yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data yang diharapkan.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran umum Desa Pematang Kerasaan Rejo

Desa Pematang Kerasaan Rejo terdiri dari 6 dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V dan Dusun VI yang dipimpin oleh 1 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Dan Kepala Dusun. Desa tersebut dikelilingi sebagian besar sawah dan ladang ubi dan sawit. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, Jumlah Penduduk Pematang Kerasaan Rejo terdiri dari 4.156 jiwa, dengan rincian 2.082 laki-laki dan 2.074 perempuan.

Secara umum mata pencaharian warga Desa Penduduk Pematang Kerasaan Rejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu 315 orang Petani, 150 orang Buruh Tani, 29 orang PNS, 6 orang Purnawirawan/Pensiunan, 30 orang Karyawan, 280 orang Wiraswasta. Kondisi keyakinan dalam beragama warga Desa Penduduk Pematang Kerasaan Rejo adalah Islam, Kristen, Hindu. Sebagai sarana dan prasarana tergeraknya dan bangkitnya keagamaan disana yang sesuai kaidah islam dalam al-Qur'an dan as-sunnah.

Dengan mengadakan program-program yang berkaitan dengan hari besar ke-islaman seperti memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan sebagainya. Hasil survei tim KKN juga memperoleh informasi bahwa kondisi pendidikan di Desa Pematang Kerasaan Rejo cukup baik.

3.9.2 Letak dan keadaan wilayah



(Gambar 3.2: sumber Kantor Kepala Desa Pematang Kerasaan rejo)

1. Geografis Desa

Nama Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan Rejo

Kecamatan : Bandar

Kabupaten/Kota : Simalungun

Provinsi : Sumatera Utara

Luas wilayah : 549 ha

Batas sebelah utara : Desa Marlihat Bandar

Sebelah selatan : Desa Pematang Kerasaan

Sebelah timur : Perkebunan Dosin

Sebelah barat : Desa Mariah Bandar

Sawah Tehnis : 331 ha

Ladang : 175 ha

Pekarangan : 42 ha

Jalan desa : -

Tanah wakap : 1 ha

Keadaan topografi : Datar dan Bergelombang

Ketinggian dari permukaan air laut ± 80 mdpl

Jumlah Dusun : 6 (enam) dusun

Jarak

- a. desa ke kota kecamatan 7,50 km
- b. desa ke kota kabupaten 33,00 km
- c. desa ke kota provinsi 159.00 km

2. Sarana dan Prasarana

Desa Pematang Kerasaan Rejo memiliki sarana dan prasana yang sudah cukup baik, sebab telah tersedianya sarana peribadahan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, lembaga ekonomi, lembaga penyuluhaan, kios/grosir, sedangkan prasarana sendiri misalnya jembatan, irigasi dan jalan telah dikelola dengan cukup baik oleh pemerintah desa. Sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat yang dapat mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki suatu daerah maka akan mempercepat laju perkembangan daerah tertentu sesuai dengan berjalannya waktu. Adapun sarana dan prasaran yang dimiliki oleh pemerintah desa di Pematang Kerasaan Rejo dapat dilihat melalui tabel dibawah sebagai berikut:

a. Tabel 3.1 Sarana dan Prasrana Pemaatang Kerasaan Rejo

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sarana Peribadahan	
	Masjid	5
	Mushola	3
2	Gereja	1
	Sarana Kesehatan	
3	Posyandu	6
	Bidan desa	2
3	Sarana Pendidikan	
	TK	2

SD	3
SMP	2
SMA	0

(sumber: Kantor Desa Pematang Kerasaan Rejo)

3. Visi dan Misi Desa Pematang Kerasaan Rejo

Adapun visi dari Desa pematang Kerasaan Rejo yaitu “Dengan Semangat Persaudaraan, Gotong Royong Dan Akhlak Mulia Guna Mewujudkan Desa Langkap Yang Luar Biasa” kemudian untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dilakukan oleh Desa Pematang Kerasaan Rejo adalah sebagai berikut :

- a) Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Langkap periode yang lalu sesuai dengan fungsinya.
- b) Menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA), Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- c) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Langkap yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
- d) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Langkap yang meliputi Penyelenggaraan pemerintahan yang Tertib dan Transparan, Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu : Cepat, Tepat dan Benar

- e) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

3.9.3 Struktur dan Deskripsi Tugas Perangkat Desa

- a. Gambar 3.3 Struktur Organisasi Desa Pematang Kerasaan Rejo



(Sumber: Kantor Kepala Desa pematang Kerasaan Rejo)

b. Tugas Perangkat Desa

1. Badan Pemerintahan Desa (BPD) adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.
2. Kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.
3. Sekretaris desa yang bertugas perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengolahan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.
4. Kaur Pemerintahan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
5. Kaur Pembangunan bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola Administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa

dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

6. Kaur Keuangan yang berfungsi untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, investasi kekayaan desa, dan administrasi umum dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
7. Kepala Dusun bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat
8. Kepala Desa Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Sekretaris Desa Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
10. Kepala Dusun Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun, Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, sehingga dalam penelitian ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai koordinasi pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo

Untuk memperoleh data primer maka sumber aslinya berupa wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber di Kantor Desa Pemtang Kerasaan Rejo. Selain itu untuk memperoleh data yang lengkap, maka dibutuhkan data sekunder dalam pengambilan data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen yang dimiliki oleh kantor Desa pematang Kerasaan Rejo. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan dengan sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti dalam upaya memperoleh informasi menggunakan teknik wawancara atau dengan menanyai para informan guna menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti dalam mengumpulkan data ialah melakukan wawancara dan diskusi mengenai koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, kepada beberapa pihak yang menekuni bidang tersebut seperti pada tabel dibawah berikut

Tabel 4.1

**Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan, Usia dan
Lama Bekerja di kantor Desa Pematang Kerasaan Rejo**

No	Nama	Jabatan	Usia	Lama Bekerja
1	Sidiq Purnomo	Pangulu Pemtang Kerasaan Rejo	38 Tahun	2 Tahun
2	Sabaruddin	Kepala LPMN Pematang Kerasaan Rejo	45 Tahun	4 Tahun
3	Mahendra	Kepala Urusan pembangunan	36 Tahun	2 Tahun
4	Usman Saragih	Gamot/kepala Dusun	36 Tahun	3 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara, 2021

a. Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori:

Tabel. 4.2
Peresentase Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	4
2	Perempuan	0
Jumlah		4

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang sedangkan narasumber berasal dari jenis kelamin perempuan tidak ada.

b. Narasumber Berdasarkan Usia

Narasumber berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: narasumber dengan usia 35-50 tahun dan 51-60 tahun. Pada tabel 4.3 akan disajikan persentase narasumber berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Persentase Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi
1	35-50	4
2	51-60	0
Jumlah		4

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia 35-50 adalah sebanyak 4 orang. Sedangkan narasumber dengan usia 51-60 sebanyak tidak ada.

- c. Narasumber Berdasarkan Lama Bekerja di kantor Desa Pematang Kerasaan Rejo.

Narasumber berdasarkan lama bekerja di kantor Desa Pematang Kerasaan Rejo dapat di klasifikasikan menjadi 1 bagian, yaitu: 1-4 tahun lama bekerja. Pada tabel 4.4 berikut akan disajikan persentase narasumber berdasarkan lama bekerja:

Tabel. 4.4
Persentase Narasumber Berdasarkan Lama Bekerja
Di Kantor Desa Pematang Kerasaan Rejo

No	Lama Bekerja	Frekuensi
1	1-4 Tahun	4
Jumlah		4

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber yang bekerja di kantor Desa Pematang Kerasaan Rejo adalah 1-4 Tahun sebanyak 4 orang..

Dan secara keseluruhan yang menjadi narasumber adalah berjenis kelamin laki-laki dengan masa jabatan kurang dari lima tahun dengan usia para aparatur pemerintah desa yang relatif masih muda atau di usia produktif dalam bekerja.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Memadai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sidiq Purnomo selaku Kepala Desa Pematang Kerasaan Rejo mengatakan bahwa:

“Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa ini, saya sebagai kepala desa selalu melakukan koordinasi ataupun pembagian kerja dan tugas untuk tiap-tiap staff atau pegawai desa yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pastinya sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan Camat disitu ada LPMN, PKK, Karang Taruna yang ikut bergabung membahas pemberdayaan masyarakat seperti apa yang cocok untuk desa Pematang Kerasaan Rejo ini”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Ketua LPMN, mengatakan bahwa:

“Penggerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo sudah sangat memadai ya walaupun dari segi pendidikan masih di tingkat sedang atau biasa saja, tetapi alhamdulillah para pegawainya selalu berusaha aktif mencari inovasi dan potensi baru untuk dikembangkan di kehidupan masyarakat disini, agar ada peningkatan level dalam hidup mereka”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahendra selaku Ketua Urusan Pembangunan mengatakan bahwa:

“Desa Pematang Kerasaan Rejo jika dilihat dari usaha yang mereka kembangkan sbenernya masyarakat disini memiliki kemauan untuk mengasah ketrampilan mreka, seperti kita lihat banyak UMKM yang berjalan, mereka tetap teguh berjalan meskipun terkdang jumlah pesaing dari berbagai daerah dan sektor juga semakin banyak, namum mereka tetap bisa bertahan. Masyarakat di desa Rejo inimampunyai kelemahan dimana kurang berinovasi terhadap usaha mereka dan karena kurang pengetahuan dan minat untuk mengikuti workshop pengembangan usaha jadi usahanya kurang ada daya tarik, sedangkan untuk pemberdayaan seperti sosialisasi narkoba dan kenakaln remaja dan juga posyandu balita, ibu hamil dan juga lansia kendalanya itu ada di pola pikir mereka, mereka berpikir tidak terlalu penting untuk mendengarkan sosialisasi tersebut”.

b. Adanya Manajemen Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sidiq Purnomo selaku Kepala Desa Pematang Kerasaan Rejo mengatakan bahwa:

“Pegawai Kantor Desa di Pematang Kerasaan Rejo ini kalau intinya saja ada 13 orang nah jadi setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat pastinya kami melakukan diskusi dulu dengan camat kemudian saya koordinasikan ke anggota saya dan barulah kita jalankan program yang sudah disetujui itu, klah sudah disepakati kami juga berinisiatif untuk ikut bergabung dengan masyarakat seperti ngobrol di warung kopi dan juga di acara perwiritan ibu-ibu untuk mensosialisasikan kegiatan desa agar mereka lebih berpartisipasi”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Ketua LPMN Pematang Kerasaan Rejo, mengatakan bahwa:

“Manajemen untuk urusan pemberdayaan masyarakat ini kalau menurut saya cukup sederhana saja alurnya, jadi setelah kita sudah berbincang dengan Camat terkait program pemberdayaan masyarakat kemudian kepala desa juga sudah setuju tentunya, maka LPMN mulai menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini seperti mengembangkan UMKM yang cukup bervariasi di desa ini, kemudian ada juga program kesehatan seperti posyandu bayi dan lansia, ada juga pembuatan kelompok tani agar lebih berkembang pertanian mereka”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman Saragih selaku Gamot atau Kepala Dusun Desa Rejo mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Rejo ini sudah dikelola dengan cukup baik, hanya saja terkadang program pemberdayaan desa yang dilakukan kurang disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakatnya, karenakan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan juga jualan jualan gitu, jadinya masyarakat kadang gak paham itu programnya pemberdayaan masyarakatnya untuk apa dan manfaatnya seperti apa bagi diri mereka, sehingga saya sebagai kepala dusun juga mengajukan komplain ini programnya tolong diperjelas, seperti itu”.

c. Adanya Penyediaan Jumlah Dana Dan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sidiq Purnomo selaku Kepala Desa Pematang Kerasaan Rejo mengatakan bahwa:

“Sumber berasal dari berbagai macam sumber, baik itu dari APBN, APBD, pendapatan desa (hasil aset desa, hasil usaha desa, swadaya/partisipasi warga), maupun pendapatan lain-lain seperti dana hibah atau sumbangan yang tidak mengikat, kemudian untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat ini diperlukan waktu kurang dari tahun 2018 sampai sekarang, ya mudah-mudahan bisa terus berjalan berkembang dengan baik bagi masyarakat disini”, kami juga pernah mengikuti kegiatan pengelolaan dan desa dan juga pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang diadakan di medan untuk dapat mengalokasikan dana dengan baik”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahendra selaku Kepala urusan pembangunan Pematang Kerasaan Rejo, mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berasal dari sumber yang seperti dikatakan Bapak Sidiq, kemudian dana yang dimiliki kita rapatkan kembali untuk memperkirakan program pemberdayaan masyarakat secara fisik maupun non fisik dengan koordinasi yang jelas dari kepala desa yang memiliki laporan lebih rinci mengenai desa ini, salah satunya itu kegiatan rapat desa yang diadakan per 3 bulan untuk mengetahui aspirasi masyarakat seperti apa, kemudian ada juga pengembangan UMKM, posyandu balita dan lansia, sosialisai bahaya narkoba, pembinaan generasi muda atau kenakalan remaja”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman Saragih selaku Gamot atau Kepala Dusun Desa Rejo mengatakan bahwa:

“Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang ada di Pematang Kerasaan Rejo cukup baik karena para UMKM seperti UMKM kerupuk tempe dan udang, kerupuk putih, tape, tempe, dan juga pembungkus/pengemas makanan yang menarik, mendapatkan bantuan dana dari desa sehingga usahanya bisa lebih berkembang dan dapat memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat disana, akan tetapi ada beberapa kegiatan masyarakat yang kurang mendapat partisipasi dari masyarakat terutama anak muda, seperti pembinaan generasi muda dan juga sosialisasi narkoba, kurang mendapat perhatian lebih dari masyarakat”.

d. Adanya Penempatan Lokasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sidiq Purnomo selaku Kepala Desa pematang Kerasaan Rejo dan juga Bapak Sabaruddin selaku Ketua LPMN Pematang Kerasaan Rejo, mengatakan bahwa:

“Penempatan lokasi sesuai koordinasi dengan kepala desa, untuk program pengembangan UMKM itu ada di kampung Huta Batu 6, Simpang Remaja, Lanbao, Dusun III, dan juga di Dusun V. sedangkan untuk kegiatan sosialisasi narkoba dan kenakalan remaja itu diadakan di aula Kantor Kepala Desa, kemudian untuk posyandu balita dan juga posyandu kita lakukan secara acak, terkadang kita lakukan di kantor kepala desa dan terkadang kita ke lokasi kampung atau dusun yang sulit menemukan transportasi menuju kantor kepala desa”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahendra selaku kepala urusan pembangunan Desa Pematang Kerasaan Rejo mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan dan juga pembangunan desa yang berasal dari berbagai sumber, jika dilihat secara umum sebenarnya belum teralokasi dengan baik, karena lokasi yang kita jadikan sebagai objek atau tempat kegiatan masih memiliki akses jalan yang kurang bagus dan juga transportasi umum sangat sulit ditemukan, sehingga untuk sebagian masyarakat yang kurang mampu mengalami kendala untuk mengikuti program kegiatan masyarakat yang ada.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa lokasi yang dipilih sebagai tempat atau titik temu dilakukannya pemberdayaan masyarakat di desa Pematang Kerasaan Rejo merupakan sentra yang terdapat keunggulan dari segi sumber daya yang tersedia di desa tersebut sehingga alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat ada gambaran atau sketsa rencana yang akan dilakukan di masa mendatang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sumber Daya Manusia Yang Memadai Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan jawaban hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah memiliki sumber daya yang cukup, yang terdiri dari pemerintahan desa yang berjumlah 13 orang berisi kepala desa dan juga pegawai desa, dengan koordinasi dari berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah cukup baik karena masyarakat yang terlibat cukup mempunyai keterampilan di bidang UMKM dan juga anak muda yang mulai memasuki usia kerja, walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak berjalan lancarnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kerana kurangnya kreativitas, unruk menghasilkan produk yang bervariasi bagi UMKM dan juga kurangnya partisipasi masyarakat terutama anak muda dalam sosialisasi narkoba dan kenakalan remaja yang telah dijalankan, namaun walaupun begitu massyarakat tetap dapat mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ismail Solihin (2009:91) yang mengatakan bahwa koordinasi merupakan upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang

terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

4.2.2 Manajemen Pekerjaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan jawaban hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya diskusi atau musyawarah dengan Camat terlebih dahulu dalam menentukan arah pemberdayaan masyarakat seperti apa yang akan dijalankan dan juga dengan adanya rapat desa maka, kepala desa juga mengajak masyarakat untuk mengeluarkan ide dalam upaya membangun desa dan masyarakat yang lebih baik.

Hal di atas sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Hasibuan (2009:85) yang berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi

Koordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh tiap unit pelaksana yang telah ditentukan seperti, unit dalam pengembanagn UMKM kerupuk tempe dan udang, UMKM tapedan kerupuk putih, kelompok tani jaya jagung dan ubi terus berusaha memberikan edukasi dan juga batuan dana agar usaha mereka berkembang sehingga dapat menampung lebih banyak pekerja di desa Pematang Kerasaan Rejo, dan juga unit kesehatan dan sosial seperti posyandu balita, ibu hamil, dan

lansia, sosialisasi narkoba dan juga kenakalan remaja yang terus menerus dijalankan agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Kondisi di atas di dukung oleh pendapat Handoko (2003 :195) yang mengatakan bahwa, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

4.2.3 Penyediaan Jumlah Dana Dan Waktu Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan jawaban hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Pematang Kerasaan Rejo dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan terkait tentang dana dan juga berapa lama waktu yang diperlukan,. Dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat berasal dari berbagai sumber baik dari APBN, APBD, pendapatan desa, maupun dana hibah atau sumbangan yang bersifat tidak mengikat.

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat di Pematang Kerasaan Rejo untuk saat ini belum ada batasan waktu karena kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan saat ini merupakan program yang sudah berjalan sejak 2018 dan tentunya akan dilakukan evaluasi ulang terkait progja apa saja yang sudah mendapat feedback yang dominan dan sebaliknya untuk dipertimbangkan kembali.

Adanya penggunaan dana dan juga waktu dalam proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh G.R Terry (2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Dalam penggunaan dana desa yang dimiliki untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo, Kepala Desa bersama pegawai desa lainnya, mengikuti 2 kegiatan pelatihan yaitu pelatihan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk meningkatkan kualitas pengetahuan para pegawai pemerintah desa.

4.2.4 Penempatan Lokasi Sebagai Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan jawaban hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pematang Kerasaan Rejo tentunya sudah memiliki atau menetapkan beberapa titik kampung yang menjadi objek untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat ini. Lokasi yang dituju meliputi Huta Batu 6, Simpang Remaja, Lanbao, Dusun III, dan juga di Dusun V, yang berpotensi atau unggul dibidang UMKM.

Pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial dan kesehatan baik itu program posyandu balita, ibu hamil, dan lansia, serta sosialisai narkoba dan juga kenakalan remaja diadakan di aula kantor desa dan juga terkadang dilakukan di lapangan pemukiman warga agar dapat menjangkau masyarakat yang kurang dari segi ekonomi dan rentan terhadap penyakit.

Hal di atas tentunya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh E.F.L Brech (2007:85) yang mengatakan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaannya yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Koordinasi kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa Pematang Kerasaan Rejo dalam pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik baik itu dari proses perencanaan, koordinasi maupun implementasi kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan fungsi yang seharusnya mereka jalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan, peneliti melihat bahwa tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa Pematang Kerasaan Rejo yaitu:

1. Kepemimpinan konservatif involutif, yaitu kepemimpinan yang pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas serta melaksanakan fungsi Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

Kepala Desa, yang dibuktikan dengan adanya koordinasi atau diskusi/musyawarah dengan Camat terkait rencana pemberdayaan desa yang akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota pemerintahan desa.

2. Kepemimpinan inovatif progresif, yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan rapat desa yang dilakukan oleh kepala desa setiap kali ada rencana pembaharuan program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan dan yang baru akan mulai berjalan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, tentunya tidaklah semua berjalan dengan lancar, ada beberapa hambatan atau kendala yang pastinya selalu ditemui, begitu pula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Pematang kerasaan Rejo. Hambatan yang dialami oleh para aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas mereka dalam hal pemberdayaan masyarakat ialah kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional
- b. Rendahnya pendidikan masyarakat
- c. Pemuda – pemudi yang tidak aktif dalam bersosialisasi
- d. Kurang berani dalam berkreaitifitas sehingga produk desa yang dihasilkan cenderung tidak ada perubahan.

Hambatan atau kendala tersebut sanagatlah mempenagruhi keputusan pemerintah desa dalam menentukan keberlangsungan progja pemberdayaan masyarakat, maka dari itu kepala desa beserta pegawai desa dengan dana desa yang dimiliki juga memaksimalkan kinerja merka dengan mengikuti pelatihan pengelolaan dana desa dan juga pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi di masyarakat agar partisipasi dan tingkat kreatifitas masyarakat dalam berkembang yaitu:

- a. Ikut bercengkrama dengan warga, seperti di warung kopi untuk lebih akrab dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga sediki demi sedikit para aparatur pemerintah desa mengetahui pola pikir masyarakat dan acara memotivasi mereka.
- b. Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui acara wirit para ibu-ibu di desa Pematang Rejo, karena dipercaya dapat lebih menyebarluaskan progja pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo sudah baik walaupun beberapa pegawai tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun kreatifitas, inovasi dan usaha mereka yang terus aktif sangat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Manajemen pekerjaan dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif yang dapat dilihat dari manajemen atau pengelolaan pemberdayaan program masyarakat yang terlebih dahulu di musyawarahkan dengan Camat dan kemudian mengadakan rapat desa mengenai program tersebut. Setiap instansi sudah ada bidang bidangnya sendiri. Namun untuk pembagian tugas di Desa Pematang Kerasaan Rejo dan BPD belum terealisasi. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengerti prosedur. Seharusnya pemerintahan Kerasaan Rejo memberikan petunjuk agar masyarakatnya paham dan mengerti seperti apa prosedur sebenarnya. Sebaiknya kepala desa Kerasaan Rejoitu mereka yang tidak sibuk dan tidak kerja diluar kota agar nanti masyarakat yang ingin menyampaikan

aspirasi kepada para pegawai kantor desa, tidak kesulitan dan menunggu lama.

- c. Penyediaan jumlah dana dan waktu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Pematang Kerasaan Rejo dapat dilihat bersumber dari berbagai macam sumber baik itu APBN, APBD, Pendapatan asli desa, maupun hasil dana hibah dan juga hasil aset desa yang bersifat sah. Rapat koordinasi yang terstruktur hanya dimiliki sebanyak 3 kali dalam satu bulan tingkat kecamatan. Untuk Kerasaan Rejo sendiri belum ada. Rapat koordinasi juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan setiap instansi dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan adanya rapat koordinasi setiap instansi juga dapat bertukar informasi agar penyelesaian masalah dapat dilakukan semaksimal mungkin. Dan masyarakat Sipungguk juga dilibatkan dalam rapat jika masyarakat dibutuhkan, untuk BPD nya terkadang tidak dilibatkan sebaiknya kepala desa mengundang BPD karena kalau tidak ada BPD pemerintahan itu tidak akan berjalan digunakan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan desa.
- d. Penempatan lokasi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik yang dapat dilihat dari pemilihan lokasi kampung/dusun yang memang memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan seperti di Huta Batu 6 yang banyak terdapat UMKM misalnya pembuatan kerupuk tempe dan udang, pembuatan tempe dan lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran bahwa:

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki di pematang Kerasaan Rejo jika dilihat memang memiliki keunggulan pada tekad dan usaha mereka untuk terus memajukan pembangunan juga pola pikir masyarakat disana akan tetapi ada baiknya apabila SDM yang bertugas sebagai pelaksana kerja desa di fasilitasi pelatihan dalam mensosialisaikan atau memberikan pelatihan berbicara di depan umum agar program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut dapat dipahami dengan mudah dan mendapatkan feedback yang lebih maksimal dari masyarakat.
- b. Manajemen pekerjaan dalam pemberdayaan masyarakat yang di koordinasikan oleh kepala desa bersama anggota pemerintah desa sebenarnya cukup baik hanya saja karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan pembangunan dan pemberdayaan desa membuat beberapa program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik, maka dari itu kepala desa harus lebih merakyat dengan masyarakat setempat agar mereka tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan desa mereka.
- c. Penyediaan jumlah dana dan waktu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Pematang Kerasaan Rejo yang dialokasikan lebih banyak ke arah pengembangan UMKM, seharusnya juga diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan kesehatan

mereka, seperti posyandu dan sosialisasi bahaya narkoba yang paling rentan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

- d. Penempatan lokasi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dipilih dengan baik yaitu dengan melihat potensi desa yang dapat dikembangkan dan memiliki sumber daya yang lebih unggul, namun akses transportasi yang kurang memadai membuat masyarakat tidak begitu banyak merasakan dampak dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagong, Suyatna. 2005. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Brech, E.F.L. (2010). *The Principle and Practice of Management*. USA: Longman Publishing Group
- Gary Yukl. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Indeks, 2009
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard. *Kepemimpinan Birokrasi*, Terjemahaan Harbani Pasolong, (2013). Bandung: Alfabeta.
- Handoko, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- John D Millet. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta:Grasindo
- Manullang, M. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. 2010. *Organizational Behavior, Emerging Knowledge and Practice for The Real World (5th ed.)*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Mustakim Zaini Mochammad. 2015. *Kepemimpinan Desa Cetakan Pertama*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Najiati, Sri, Asmana Agus, dan I Nyoman N. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Nana Syaodih. 2011. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Rivai, Veitzhal dan Mulyadi Deddy. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Salam, Setyawan Dharma. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suharto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media:
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Usman Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yohanes. Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Zaccaro, S. J., & Klimoski, R. J. 2001. The nature of organizational leadership: an introduction. In S. J. Zaccaro, & R. J. Klimoski (Eds.). *The nature of organizational leadership: Understanding the performance imperatives confronting today's leaders*. Hal : 3-4.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Arfah, k. a. (2019). *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Biak Kota*. Gema Kampus IISIP YAPIS Biak, 14(2), 9-16..
- Dimianus Ding. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02

Iga, Rosalina. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari), h. 3

Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2016). *Efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (bum desa) berbasis ekonomi kerakyatan di desa warungbambu kecamatan karawang timur kabupaten karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana, 1(2), 31-31.

Fauzan, R., & Latifah, R. (2015). *Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Mengontrol Manajemen Kualitas Menggunakan Cobit 4.1 (Studi Kasus: PT Nikkatsu Electric Works)*. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 1(3).

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Kepala Desa. 2014

Pemerintah No. 72 Pasal 15 Tentang Desa. 2005

Undang-Undang Nomor 32 Ttentang Pengertian Desa. 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RETNO AYU TIA
Tempat/tanggal lahir : Pem. Kerasaan rejo, 17 oktober 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama/bangsa : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Jalan bukit siguntang
Anak ke : 3
Nama orang tua
Ayah : Rahmat
Ibu : Samini
Alamat orang tua : Perdagangan

Riwayat pendidikan

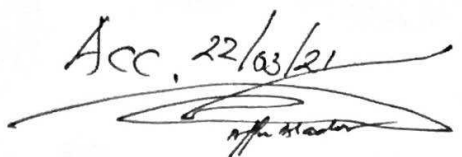
1. Tamatan 2008 : SDN N0. 091652 pematang kerasaan rejo (berijazah)
2. Tamatan 2014 : MTS NEGERI BANDAR kabupaten simalungun(berijazah)
3. Tamatan 2017 : SMA NEGERI BANDAR kabupaten simalungun(berijaza)
4. Kuliah pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik program ilmu administrasi publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Penulis

Retno ayu tia

Acc. 22/03/21



DAFTAR WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI : KOORDINASI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN REJO
KABUPATEN SIMALUNGUN

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Alamat :

“Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan untuk mendapatkan informasi keperluan penyelesaian skripsi sebagaimana dengan judul yang tertera diatas. Atas bantuan saya ucapkan terimakasih”

A. Pertanyaan Koordinasi

- a. Kesatuan tindakan
- b. Penyampaian komunikasi
- c. Pembagian kerja
- d. Disiplin

1. Apa saja yang dilakukan terhadap bawahan dalam upaya mewujudkan kesatuan tindakan dalam pelaksanaan tugas pada bawahan dan masyarakat?
2. Apa saja yang dilakukan dalam penyatuan organisasi di desa pematang kerasaan rejo?
3. Dalam bentuk penyampaian bagaimanakah upaya untuk menyatukan tindakan itu bapak lakukan, apakah ada rapat tersendiri atau khusus tentang hal tersebut?
4. Apakah bapak sebagai pimpinan intensif untuk menyampaikan komunikasi kepada bawahan dan masyarakat?
5. Komunikasi dalam bentuk apa yang dilakukan untuk menyempurnakan koordinasi dalam berbagai pihak?
6. Apakah bapak mendistribusikan pembagian kerja sesuai dengan bidangnya kepada bawahan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas?

7. Apakah para bawahan bisa melaksanakan arahan bapak dalam pembagian kerja tersebut?
8. Bagaimana di dalam menerapkan disiplin terhadap bawahan dan pihak lain dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan koordinasi yang harmonis?
9. Apakah ada aturan disiplin tertulis yang dijadikan sebagai standart pelaksanaan tugas?

B. Pertanyaan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Adanya peningkatan kemampuan masyarakat
 - b. Peningkatan kesadaran untuk berpartisipasi
 - c. Adanya manfaat atau hasil yang diterima masyarakat
 - d. Adanya Peningkatan motivasi program-program pemberdayaan masyarakat
1. Apakah adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan?
 2. Bagaimana peran kepala desa dalam peningkatan kemampuan masyarakat?
 3. Apakah kepala desa juga ikut mengajak masyarakat dalam peningkatan kesadaran untuk berpartisipasi?
 4. Apakah dilakukannya koordinasi oleh kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran itu sendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi?
 5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut?
 6. Apa partisipasi yang dilakukan masyarakat terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh kepala desa?
 7. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut?
 8. Apa saja manfaat atau hasil yang diterima masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Kerasaan Rejo?
 9. Apakah dampak dari program pemberdayaan masyarakat memiliki manfaat atau hasil bagi masyarakat?
 10. Apakah menurut anda kepala desa mempunyai motivasi yang lebih dalam menjalankan proses pemberdayaan masyarakat?
 11. Apakah adanya keberhasilan dalam program-program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif?
 12. Bagaimana kepala desa sebagai pemimpin dalam memberikan motivasi kepada masyarakat?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

044

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Medan, 19 February 2021

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nail Khairah, S.P., M.Pd
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Retno ayu tia
 N P M : 1703100054
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 1310 sks, IP Kumulatif 3.37.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Koordinasi tingkat Pimpinan desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pematang kerasan Rejo kabupaten Simalungun	A
2	Strategi Pelatihan dalam Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa Pematang kerasan Rejo	
3	Pemberdayaan masyarakat Desa melalui Badan usaha milik Desa (BUMDes) di desa Pematang kerasan Rejo	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 19 February 2021.

Ketua,

(Nail Khairah, S.P., M.Pd)

(Retno ayu tia)

Retno ayu tia

Pembimbing Affan Al gutha

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Unggul, Cerdas, Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 221/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **19 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RETNO AYU TIA**
N P M : 1703100054
Program Studi : Ilmu Administras i Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG
KERASAAN REJO KABUPATEN SIMALUNGUN**

Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 044.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 07 Rajab 1442 H
19 Februari 2021 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.

Kepada Yth :
Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RETNO AYU TIA
NPM : 1703100054
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Pembangunan

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu :

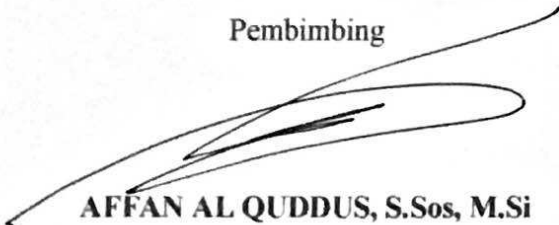
**KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

MENJADI

**KOORDINASI KEPIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian Ibu Ketua Jurusan saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Pembimbing



AFFAN AL QUDDUS, S.Sos, M.Si

Pemohon,
Mahasiswa



RETNO AYU TIA

Diketahui,
Ka. Jurusan Ilmu Administrasi Publik



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.PD



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 23 Februari 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Retno Ayu Tia
 N P M : 1703100054
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 221...../SK/IL.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 19 Februari 2021..... dengan judul sebagai berikut :

Koordinasi Tingkat Pimpinan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
 Di Desa Pematang Kerasaan Rejo Kabupaten Simalungun

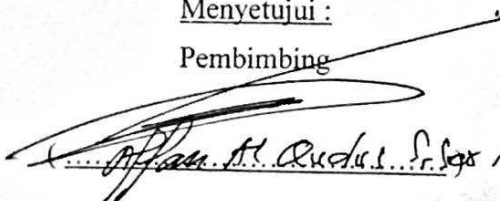
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

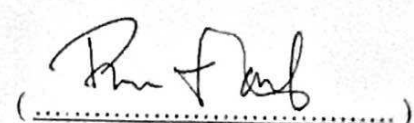
Menyetujui :

Pembimbing



 Retno Ayu Tia

Pemohon,



 Retno Ayu Tia

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : **Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
16	RIMADONA HUSMAYANTI	1703100038	NAILI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
17	ANITA SIHOMBING	1703100001	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
18	NABILA ADAWIYAH	1703100022	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IDA MARTINELLI, SH, MM	KINERJA KEPALA DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG
19	INDY LESTARI	1703100062	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IDA MARTINELLI, SH, MM	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PULO BANDRING
20	RETNO AYU TIA	1703100054	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos, M.SP	KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN REJO KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 13 Rajab 1442 H
25 Februari 2021 M


Dr. Atihs Saifuddin, S.Sos., M.S.P.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **RETNO AYU TIA**
 NPM : **1703100054**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**
 Judul Skripsi : **Koordinasi Kepemimpinan kepala desa dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Pematang Terasa Kabupaten Simalungun.**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18 feb 2021	Bimbingan proposal latar belakang	f
2.	19 feb 2021	Bimbingan proposal uraian teoris	f
3.	23 feb 2021	Bimbingan proposal terangkan konsep	f
4.	24 feb 2021	Bimbingan jenis penelitian, kerangka konsep	f
5.	24 feb 2021	Bimbingan Ace proposal	f
6.	20 maret 2021	Bimbingan Draft wawancara	f
7.	05 sep 2021	Bimbingan tentang hasil Pembahasan dan hasil wawancara	f
8.	15 sep 2021	Bimbingan tentang hasil wawancara dan Pembahasan.	f
9.	20 sep 2021	Bimbingan tentang Pembahasan sesuai dengan kategorisasi.	f
10.	07 oktober 2021	Ace skripsi	f

Medan, 07 Oktober 2021

Dekan,

 (Dr. Anwar Saiful...)
 S.Sos., M.P.

Ketua Jurusan,

 (Ananta Mahandita)
 S.Sos., M.P.

Pembimbing,

 (Afan al-Qudus...)
 S.Sos.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menawar surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 440/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Medan, 13 Syaban 1442 H

Lampiran : -,-

27 Maret 2021 M

Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Kepada Yth : **Kepala Desa Pematang Kerasaan Rejo
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RETNO AYU TIA**
N P M : 1703100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **KOORDINASI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG
KERASAAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIFIN SALTH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN BANDAR
NAGORI PEM. KERASAAN REJO

Alamat: Jln Perdagangan-Pem.Siantar Km 7,5 Kode Pos : 21184

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/ 398 / IX / SK / 2002 / 2021

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 440/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021. Tertanggal 27 Maret 2021, dengan ini Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : **RETNO AYU TIA**
NPM : 1703100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Lokasi : Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Judul : **KOORDINASI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG
KERASAAN REJO KABUPATEN SIMALUNGUN**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah – Sumatera Utara.

Bahwa yang tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan bandar Kabupaten Simalungun.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarrkan di : Pematang Kerasaan Rejo
Pada Tanggal : _____

PANGULU PEM. KERASAAN REJO

SIDIK PURNOMO



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1197/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 15 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	EKA PRATIWI HARDINI BR LUBIS	1703100067	AMANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN AL-QUDDUS., S.Sos., M.Si.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGURUSAN IZIN ANGKUTAN KOTA DALAM TRAYEK DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
2	RETNO AYU TIA	1703100054	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AFFAN AL-QUDDUS., S.Sos., M.Si.	KOORDINASI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN KABUPATEN SIMALUNGUN
3	MANISHA APRILA	1703100089	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	PEMANFAATAN SISTEM DARING DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
4						
5						

Tidak 3 mhs
Punya soal

Notulis Sidang:

Ditandatangani oleh:

a.n. Rektor
Wakil Rektor I
Dr. FIKRI MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 06 Rabul Awwal 1443 H

13 Oktober 2021 M

Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., MSP.

